

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Berakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 – 2017 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Brebes. Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up dan top down process

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis , terpadu, transparan, dan akuntabel ; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*)

menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi

sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Renstra SKPD atau disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985/75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318)
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
 11. Undang-Undang Republik Indonesia I Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [Nomor 4737](#))
-

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014;
17. Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
30. Perda Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2012-2017 adalah memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama lima tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam **RPJMD**.

1.4 Sitematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes tahun 2012–2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I **Pendahuluan** menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan hubungan Rentra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes tahun 2012-2017.
- BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menguraikan tentang Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya dan Kinerja Pelayanan Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes
- BAB III **Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**, menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih isu-isu Strategis, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan** menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes
- BAB V **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan **Indikatif****

menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Tabel.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD menguraikan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pembangunan Daerah Tahun 2012 - 2017

Bab VII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Pokok, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Brebes di bentuk melalui Peratutran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang meliputi bidang, bina marga, cipta karya, kebersihan dan pertamanan serta bidang Penataan Ruang , dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang bina marga, cipta karya, kebersihan, pertamanan dan tata ruang.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes mempunyai fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga , cipta karya, kebersihan, pertamanan dan tata ruang ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan dibidang pekerjaan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum ;

- d. Pembinaan terhadap UPTD dibidang pekerjaan umum
- e. Pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 (*terlampir*) Sedangkan Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Bina Marga
 - 1). Seksi Bina Teknik
 - 2). Seksi Peningkatan Jalan
 - 3). Seksi Pemeliharaan Jalan
 - 2. Bidang Cipta Karya
 - 1). Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 2). Seksi Perumahan dan Tata Kota
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman
 - 3. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - 1). Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
 - 2). Seksi Pertamanan
 - 3). Seksi Penerangan Jalan Umum
 - 4. Bidang Penataan Ruang

- 1). Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan
- 2). Seksi Penataan dan Pengawasan
- 3). Seksi Pembinaan Tata Ruang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sedangkan uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugasnya adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan untuk membagi tugas kepada sekretariat, bidang. Kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- c. Menyelenggarakan kegiatan untuk mengkoordinasikan Sekretariat, Bidang Kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan terhadap bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai.
- e. Menyelenggarakan kegiatan untuk penyelia pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang, Kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- f. Menyelenggarakan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Bidang, Kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- g. Menyelenggarakan kegiatan untuk penilaian prestasi kerja Sekretaris, Bidang, Kelompok jabatan fungsional dan unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai bahan untuk pertimbangan **karier**;

- h. Menyelenggarakan kegiatan untuk menetapkan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum ;
- i. Menyelenggarakan kegiatan menelaah kebijakan peraturan perundang undangan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
- j. Menyelenggarakan penyusunan saran alternatif dibidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
- k. Menyelenggarakan kegiatan mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
- l. Memberikan layanan teknis dibidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- m. Menyelenggarakan penyusunan laporan dinas pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan hasil yang dicapaisebagai ertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan dikirim kepada bupati secara berkala ;
- n. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan Dinas ;
- o. Menyelenggaraakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Kepala Sekretariat :

Sekretariat merupakan unsur pelayanan administratif yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang perencanaan program, keuangan, kepegawaian ketatausahaan, kerumahtanggan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan Umum.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan bidang perencanaan program ;
- b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, perjalanan dinas, perlengkapan dan kepegawaian ;
- c. Melaksanaan kegiatan pengelolaan ketatalaksanaan ;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala **dinas**.

3. Kepala Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas untuk menyelenggarakan kegiatan melaksanakan kewenangan daerah dibidang Bina Marga yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga ;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan dibidang bina marga ;
 - c. Melaksanakan pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ;
 - d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
 - e. Melaksanakan pengumpulan data dan laporan kegiatan dibidang bina marga ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Kepala Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas untuk melaksanakan kegiatan dibidang tata bangunan dan lingkungan, perumahan dan tata kota, sarana dan prasarana pemukiman.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang cipta karya ;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pelaksanaan pekerjaan bidang cipta karya ;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan kegiatan bidang cipta karya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikakan kepala dinas.

5. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dibidang kebersihan, lingkungan tempat-tempat umum dengan mengumpulkan, penampungan dan pengelolaan sampah ;
- b. Melakukan pengkajian penerapan teknologi tepat guna untuk penanganan/pengelolaan dan mendaur ulang sampah ;
- c. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan dibidang pertamanan, penghijauan kota dan mengadakan pembibitan
- d. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan penerangan jalan di wilayah Ibu Kota Kabupaten ;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum serta pengaturan tata letak pemasangan lampu jalan dan memberikan rekomendasi pengawasan sarana penerangan jalan.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang.

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan pengembangan kawasan, pembinaan, penataan dan pengawasan tata ruang.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan pengembangan kawasan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang Penataan dan pengawasan pemanfaatan Ruang ;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang pembinaan tata ruang ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum memiliki berbagai sumber daya dari SDM, Asset/Modal dan usaha yang beroperasi dengan perincian sebagai berikut :

2.2.1. SDM

Jumlah PNS 275 Orang

1) Jumlah PNS menurut pendidikan

P N S	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	
	75	48	110	2	37	3	275

2) Jumlah PNS menurut golongan

P N S	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
	94	110	63	5	275

3) Jumlah PNS menurut Eselon

P N S	ESELOK				JUMLAH
	I	II	III	IV	
			5	20	25

2.2.2 ASSET/MODAL

a. Asset Modal :

Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes dan Bangunan Pendukung untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi terdiri dari :

- Gedung utama yang digunakan sebagai pusat perkantoran di Jalan Jendral Sudirman nomor 129 Brebes.
- Gedung Kantor UPTD :
 1. Kantor UPTD Brebes terletak di Kecamatan Brebes
 2. Kantor UPTD Tanjung terletak di Kecamatan Tanjung
 3. Kantor UPTD Banjarharjo terletak di Kecamatan Ketanggungan
 4. Kantor UPTD Bumiayu terletak di Kecamatan Bumiayu
 5. Kantor UPTD Bantarkawung terletak di Kecamatan Bantarkawung
- Work Shop (Bengkel Kerja)
- TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
- TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan sistem Open Damping

Aset Alat Berat sebagai Pendukung Operasional Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes terdiri dari :

ALAT BERAT	TONASE	JUMLAH	TAHUN	KONDISI
EXCAVATOR EX 200	-	2 Unit	2001	Rusak
BACHU LOADER	-	1 Unit	1994	Rusak
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	1974	Rusak
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	1975	Rusak
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	1976	Rusak
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	1977	Rusak
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	1980	Sedang
MESIN GILAS	2,5 Ton	1 Unit	1981	Sedang
MESIN GILAS	10 Ton	1 Unit	1985	Rusak
MESIN GILAS	10 Ton	1 Unit	1992	Sedang

MESIN GILAS	10 Ton	1 Unit	1993	Sedang
MESIN GILAS	8 TON	1 Unit	2001	Sedang
MESIN GILAS	8 Ton	1 Unit	2001	Sedang
MESIN GILAS	8 Ton	1 Unit	2001	Sedang
MESIN GILAS	8 Ton	1 Unit	2001	Sedang
MESIN GILAS	6 Ton	1 Unit	2001	Sedang
MESIN GILAS TR	2,5 Ton	1 Unit	2003	Baik
MESIN GILAS TR	1,5 Ton	1 Unit	2003	Baik
MESIN GILAS TR	1,5 Ton	1 Unit	2003	Baik
MESIN GILAS TR	1,5 Ton	1 Unit	2003	Baik
MESIN GILAS WAKER	1 Ton	1 Unit	1980	Rusak
MESIN GILAS WAKER	600 Kg	1 Unit	1994	Rusak
MESIN GILAS WAKER	600 Kg	1 Unit	1994	Rusak
MESIN GILAS WAKER	600 Kg	1 Unit	.1994	Rusak
Dump Truk		2 unit		Baik
Dump Truk		12 Unit		Sedang
Dump Truk		3 unit		Rusak
Truk Tangki air		1 Unit		Sedang
Truk Tangki air		1 Unit		Rusak
Toyota Open Cup		15 Unit		Sedang
Bak sampah Motor		5 Unit		sedang
Bak sampah Motor		4 Unit		rusak
Toyota Rush		1 Unit		baik
Toyota Kijang LX		1 Unit		sedang
Susuki Carry		1Unit		Sedang
Sepeda Motor		6Unit		Baik
Sepeda Motor		16 Unit		Sedang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(terlampir)

Tabel : 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Brebes
(terlampir)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/ hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes sebagai unsur dinas Teknis yang menangani Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Kebersihan dan Pertamanan dan Bidang Penataan Ruang mempunyai beberapa permasalahan yang menjadi kendala sekaligus tantangan untuk memacu dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang utamanya yang berkaitan dengan

Infrastruktur Publik Bidang Pekerjaan Umum, adapun permasalahan yang dihadapinya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga :

1.1 Kondisi Jalan Kabupaten Brebes pada akhir 2012, yang berjarak sepanjang 656, 84 Km kondisi baik baru 304,247 km (46,60 %), kondisi Rusak Ringan 69,690 km (10,67%), kondisi sedang 104,100 km (15,96%), dan rusak berat 174,890 km (26, 79%). Ada beberapa yang mempengaruhi kondisi jalan rusak antara lain, faktor cuaca, kondisi tanah, kualitas jalan dan kesadaran masyarakat pengguna jalan terutama transportasi angkutan barang yang melebihi tonase, sehingga jalan tidak mampu menahan beban yang bukan kelasnya.

1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Brebes, terutama wilayah brebes selatan merupakan daerah rawan bencana, terutama bencana tanah longsor.

1.3 Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata

1.4 Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu

2. Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi

2.1 Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan.

2.2 Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet

2.3 Kebutuhan mobilitas di wilayah Desa berkembang dan lintas utama

2.4 Kebutuhan aksesibilitas *domestic connectivity* dan mendukung pusat kegiatan ekonomi kreatif

3. Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai

4. Bidang Cipta karya

5. Bidang Kebersihan dan Partamanan

6. Bidang Penataan Ruang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

Berdasarkan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (Analisa SWOT) diperoleh serangkaian kondisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

1. Kekuatan – kekuatan Internal ;

- a. Tersedianya prasarana dan sarana yang cukup memadai ;
- b. Tersedianya alokasi dana untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana ;
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai ;
- d. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan keuangan .

2. Kelemahan – kelemahan Internal ;

- a. Belum mantapnya penataan kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes ;
- b. Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan prasarana pekerjaan umum ;
- c. Terbatasnya tenaga teknis yang berkualitas ;
- d. Terbatasnya jumlah dan jenis alat berat untuk pekerjaan diberbagai medan yang berat yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

3. Peluang – peluang Eksternal ;

- a. Tersedianya sarana, khususnya alat berat milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang pengelolaannya diluar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes ;
 - b. Tersedianya dana di Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum ;
 - c. Adanya hubungan yang harmonis antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat ;
 - d. Kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan prasaana dan sarana pekerjaan umum, melalui pemberdayaan masyarakat.
 - e. Kebijakan Bupati melalui 6 pilar Misi Bupati terpilih, salah satu pilar adalah peningkatan Infrastruktur jalan Kabupaten.
4. Tantangan - tantangan Eksternal ;
- a. Kurang disiplinnya masyarakat terhadap pemanfaatan prasarana dan sarana pekerjaan umum ;
 - b. Dampak pertumbuhan sosial ekonomi pada kerusakan prasarana dan sarana pekerjaan umum ;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana yang disebabkan oleh kondisi alam seperti banjir, tanah longsor dan tanah labil ;
 - d. Kondisi geologis yang berbukit – bukit, rawa dan sungai yang lebar – lebar serta tanah yang labil
 - e. Belum sepenuhnya aparat Pemerintah Daerah konsisten dalam penegakan Peraturan Daerah .

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan rumusan isu-isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. Perumusan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan SKPD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; (4) implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan (5) implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (UU No. 25 Tahun 2004). Pernyataan singkat berisi cita-cita organisasi dimasa yang akan datang. (ISO 9001-2000)

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tupoksi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan data (Permendagri 54/2010)

Salah satu aspek yang mendukung proses tercapainya kondisi yang lebih baik yaitu “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan” harus didukung prasarana dan sarana publik berkualitas dan berkesinambungan

Berkenaan itu Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah:

” TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG BERKUALITAS DAN BERKESINAMBUNGAN “

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut ;

- 1.) Tersedianya prasarana dan sarana publik Bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas dan berkesinambungan dikandung maksud ” Kualitas ” yaitu adanya prasarana dan sarana yang mempunyai kualitas baik / mantap sehingga dapat berfungsi secara optimal dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang panjang.

Mengingat Kabupaten Brebes wilayahnya cukup luas, maka dibutuhkan jumlah prasarana dan sarana yang memadai agar mampu mendukung dan mengakses seluruh kegiatan produksi ke daerah yang paling terpencil sekalipun .

3. Dengan kondisi prasarana dan sarana publik bidang pekerjaan umum yang berkualitas diharapkan dapat mendukung visi Kabupaten Brebes “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”

4.2 Misi SKPD

Untuk menjabarkan Visi yang di cita citakan perlu diaplikasikan melalui misi, Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Bidang Pekerjaan Umum ;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan ;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana lingkungan pemukiman dan penataan kota ;

- e. Meningkatkan fasilitas penunjang dalam rangka penanggulangan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum ;
- f. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tata Ruang, penataan dan Pengembangan Kawasan ;
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan fisik pekerjaan umum
- h. Peningkatan Kerja sama lintas daerah bidang pekerjaan daerah khususnya daerah perbatasan.

PENJELASAN MASING – MASING MISI

Penjelasan masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Bidang Pekerjaan umum yang memadai adalah dalam rangka upaya peningkatan alat berat untuk mendukung kecepatan penanganan jalan, jembatan, sampah dan penerangan jalan umum dan kesiapan menghadapi terjadinya bencana alam
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi dan penggantian maupun pemeliharaan jalan dan jembatan beserta segenap utilitas yang ada agar prasarana dan sarana yang dimaksud mempunyai kualitas yang baik dan mantap sehingga dapat berfungsi secara optimal dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang panjang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan permukiman dan penataan kota adalah upaya penyediaan perumahan layak huni dalam lingkungan permukiman yang serasi, sehat dan nyaman serta

berkelanjutan. Sedangkan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan , drainase dan sarana air bersih melalui kegiatan pembangunan / rehabilitasi jalan lingkungan maupun drainase serta penyediaan air bersih baik daerah perdesaan maupun perkotaan.

d. Meningkatkan fasilitas penunjang dalam rangka penanggulangan kebersihan ; pertamanan dan penerangan jalan umum yaitu upaya menunjang :

- Kelancaran kegiatan kebersihan melalui pengadaan maupun perbaikan prasarana / sarana kebersihan seperti pembangunan TPA dengan sistem Control lanvil, pengadaan Dump Truck, Transfer Depo, Ekskavator, Buldozer, penambahan TPS serta Am Roll dan Container ;
- Kegiatan pertamanan seperti pengadaan alat-alat pertamanan ;
- Penanganan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) seperti pengembangan PJU, perbaikan / penggantian trafo dan komponen PJU yang lain agar PJU dapat berfungsi optimal dan bertahan lama ;

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tata ruang, penataan dan pengembangan kawasan adalah upaya mendorong terwujudnya pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan RUTRK / RT / RW melalui kegiatan penataan bangunan maupun inventarisasi bangunan milik negara dan bangunan bersejarah

f. Meningkatkan peran serta masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan fisik bidang pekerjaan umum adalah upaya memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan prasarana fisik pekerjaan umum adalah

upaya meningkatkan peran serta masyarakat maupun lembaga – lembaga swadaya masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan melalui kerjasama kemitraan dan upaya pemberdayaan masyarakat juga melalui kegiatan pembinaan teknis, pelatihan maupun sosialisasi berkoordinasi dengan instansi terkait dengan target ;

- Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Infrastruktur air limbah dan Spam Perdesaan (PAMSIMAS)
 - Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat pemakai jalan agar dapat memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsinya ;
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan permukiman seperti tidak membuang sampah pada tempatnya ;
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga keberadaan infrastruktur seperti lampu penerangan jalan umum (PJU), prasarana kebersihan seperti TPA ; TPS ; Container dan Kebersihan ditempat – tempat fasilitas umum ; maupun lingkungan permukiman ;
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan bangunan maupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik prasarana dan sarana pekerjaan umum, baik yang dibiayai oleh Pemerintah maupun swadaya masyarakat ;
- g. Peningkatan Kerja sama lintas daerah bidang pekerjaan umum khususnya daerah perbatasan adalah melakukan percepatan pembangunan infastruktur daerah perbatasan sehingga wajah didaerah

perbatasan akan lebih indah dipandang dan bisa dijadikan etalase Kabupaten Brebes.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sejalan dengan pemaknaan visi dan misi diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang siap beroperasi;
2. Tersediaanya prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dan berumur panjang ;
3. Terwujudnya kawasan permukiman yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan ;
4. Terwujudnya Keindahan dan Kenyamanan kota hingga tingkat Ibu Kota Kecamatan (IKK)
5. Tercapainya pengelolaan kebersihan hingga tingkat Ibu Kota Kecamatan (IKK)
6. Terwudnya tatanan tata ruang perkotaan dan permukiman yang baik ;
7. Terwujudnya peran serta masyarakat yang berorientasi dengan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan bidang Pekerjaan umum ;
8. Terwujudnya sarana dan prasarana publik bidang pekerjaan umum di daerah perbatasan yang berkualitas.

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terwudnya peningkatan pelayanan kinerja kepada masyarakat ;
2. Terwujudnya kelancaran arus lalu-lintas kendaraan, barang dan jasa ;
3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni, prasarana dan sarana lingkungan yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan.
4. Menurunnya tingkat prosentasi tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas.

5. Terwujudnya taman-taman yang kota yang sejuk dan nyaman ;
6. Terwujudnya kondisi lingkungan dan permukiman yang bersih ;
7. Terwujudnya pertumbuhan perkotaan dan permukiman yang sesuai dengan RUTRK/RT/RW ;
8. Tercapainya hasil kerja yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi , tetapt sasaran dan manfaat.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi dinas yang menitik beratkan pada beberapa prioritas kebijakan yang diharapkan mampu memberi dampak signifikan pada beberapa prioritas kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes sebagai leading sector pembangunan tetap berupaya melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisa tentang kekuatan diperoleh modal dasar yang sangat menentukan terutama kebijakan bupati brebes periode 2012 -2017 yang menitik beratkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, hal ini menjadi modal dasar dalam rangka keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dinas sebagaai berikut :

- a. Tersedianya prasarana dan sarana yang cukup memadai dan berkualitas, khususnya alat berat yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- b. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk peningkatan prasarana dan sarana publik bidang pekerjaan umum ;
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai ;
- d. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan prasarana dan sarana publik bidang pekerjaan umum

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pengangan, petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi dinas.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan, adapun kebijakan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Upaya mengantisipasi kesenjangan antar wilayah (terisolir) dan peningkatan kelancaran arus lalu lintas kendaraan, barang dan jasa ;
- c. Upaya peningkatan pengelolaan persampahan dari TPS ke TPA
- d. Peningkatan Teknogi Pengelolaan sampah dari Open Dumping ke Control lanvil dan sanitari Lanvil ;
- e. Mengupayakan terwujudnya fungsi saluran drainase lingkungan, permukiman kota dan desa

- f. Meningkatkan dan mempertahankan fungsi serta masa (umur) pelayanan jalan dan jembatan ;
- g. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- h. Upaya Peningkatan penataan ruang yang integratif, komprehensif yang berbasis lingkungan ;
- i. Mengupayakan terpenuhinya fasilitas lalu lintas jalan ;
- j. Upaya mewujudkan " Brebes berhias "
- k. Upaya mewujudkan kerjasama kemitraan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Program ini adalah dalam rangka mewujudkan fasilitas kerja yang baik dan memadai guna mendukung kelancaran kinerja aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman serta kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah maupun kedalam daerah.

- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
Program ini adalah dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan kinerja aparatur melalui kegiatan pembangunan/pemeliharaan gedung kantor, pembangunan /pemeliharaan peralatan gedung kantor.
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
Program ini adalah dalam rangka peningkatan disiplin dan tertib aparatur melalui kegiatan pengadaan pakaian kerja aparatur seperti pakain batik dan pakaian olah Raga.
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
Program ini adalah dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
Kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan tertib administrasi melalui kegiatan penyusunan laporan realisasi anggaran dan keuangan.
- F. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
Program ini adalah untuk mengantisipasi kesenjangan antar wilayah dan membuka daerah terisolir, mengingat Kabupaten Brebes dengan wilayah yang cukup luas dan beberapa sungai membentang di atasnya sehingga membutuhkan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dan memadai yang dapat mengakses arus lalu lintas kendaraan, barang dan jasa ke daerah-daerah sentra produksi, sentra-sentra hasil bumi ke daerah

pemasaran dan sebaliknya. Untuk itu beberapa ruas jalan secara bertahap dan berkesinambungan akan dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Demikian juga beberapa jembatan perlu diadakan penggantian agar dapat berfungsi secara optimal dan penambahan pembangunan jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terisolir.

G. Program Pengembangan Perumahan ;

Program ini dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan pendukung Rusunawa, pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kota dan desa.

H. Program Perencanaan Tata Ruang ;

Program ini adalah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan tata ruang yang baik dan berbasis lingkungan maka perlu adanya penanganan kegiatan perencanaan teknis tata ruang yang melalui kegiatan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengawasan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Brebes.

I. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ;

Program ini adalah dalam rangka mewujudkan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang serasi, sehat, aman dan nyaman yang berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mencapai kondisi lingkungan permukiman yang sehat perlu didukung sistem pengelolaan persampahan yang baik dari sumber hingga TPA. Untuk kelancaran kegiatan tersebut melalui program ini maka perlu peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dan pengelolaan persampahan dari open dumping menuju control landfill dan sanitasi landfill.

- J. Program Pembangunan Saluran Drainasse/Gorong-gorong
Dalam Upaya meningkatkan kecancaran saluran drainase lingkungan permukiman perkotaan dan pedesaan maka melalui program ini perlu adanya penanganan saluran drainase/trotoar/gorong-gorong baik pembangunan drainase /trotoar/gorong-gorong yang belum ada maupun pemeliharaan drainase/trotoar/gorong-gorong yang sudah ada.
- K. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
Program ini dalam rangka melaksanakan Kepmendagri Nomor 147 tahun 2004 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang pasal 11 menyatakan bahwa Bupati/walikota membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- L. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan ;
Program ini adalah dalam rangka optimalisasi fungsi jalan/jembatan serta mempertahankan masa (umur) pelayanan jalan dan jembatan agar dapat berfungsi secara optimal.
- M. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
Program ini diperuntukkan untuk pembuatan/penyusunan peraturan daerah (Perda) bangunan gedung di Kabupaten Brebes.
- N. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan ;
Program ini adalah dalam upaya mendukung kelancaran penanganan kegiatan pembangunan maupun penanganan bencana alam yang ada di kabupaten brebes melalui pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat seperti Buldoze, Excavator, Mesin gilas, Dump truck.

- O. Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan ;
Program ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan/perbaikan jalan dan jembatan perdesaan, sarana dan prasarana air bersih perdesaan, jalan lingkungan perdesaan.
- P. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan ;
Program ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat kota melalui pembangunan /perbaikan jalan lingkungan kota, sarana dan prasarana air bersih perkotaan.
- Q. Program Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan ;
Program ini adalah dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan di malam hari serta upaya menurunkan persentase tingkat kecelakaan lalu lintas melalui pemeliharaan lampu-lampu PJU dan penambahan pemasangan titik lampu PJU perkotaan dan Perdesaan Jalur Pantura, jalur rawan kecelakaan dan sampai ke Desa-desa IKK.
- R. Program Pengembangan Kota ;
Program ini dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dan meningkatkan keindahan kota melalui kegiatan penangan taman-taman kota dan dalam rangka mendukung terwujudnya " **BREBES BERHIAS** "
- S. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Program ini adalah dalam rangka mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman dan nyaman serta berkelanjutan melalui pembangunan /perbaikan perumahan masyarakat kurang mampu dan perumahan PNS beserta sarana dan prasarana perumahan lainnya.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, yang disajikan dengan tabel berikut:

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD
Kabupaten Banjarnegara

Berisi tentang gambaran mengenai capaian kinerja SKPD yang terlihat dari beberapa indikator, baik indikator kinerja kunci, indikator SPM maupun indikator lainnya.

Sampai saat ini isu - isu pokok dan mendesak pekerjaan umum yang harus segera ditangani antara lain adalah masih seputar belum mantapnya pelayanan prasarana dan sarana umum, makin tingginya tuntutan masyarakat dibidang pembangunan fisik prasarana dan sarana serta kesenjangan antar wilayah. Semuanya merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi dengan pendekatan yang arif dan bijaksana.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, strategi pembangunan pekerjaan umum diarahkan pada terwujudnya prasaran dan sarana pekerjaan umum yang mantap dan memadai ditandai dengan makin meningkatnya kondisi prasarana dan sarana yang makin baik serta dapat berfungsi secara optimal dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang cukup panjang.

Dengan latar belakang seperti tersebut diatas, maka ditentukan strategi kebijakan pembangunan pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana pekerjaan umum yang mantap dan memadai ;
2. Mengoptimalkan fungsi prasarana sarana pekerjaan umum melalui kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum secara terus menerus dan berkesinambungan ;
3. Memberdayakan masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum ;

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Brebes di bidang pekerjaan umum yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes dibidang pekerjaan umum yang meliputi bidang pengairan, bina marga, cipta karya, serta kebersihan dan pertamanan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengairan, bina marga, cipta karya serta kebersihan dan pertamanan ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mempunyai fungsi ;

Bertolak dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, maka kebijakan / program / kegiatan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2008 - 2013) disusun agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan sasaran teknis yaitu terwujudnya prasarana dan sarana pekerjaan umum yang mantap dan memadai guna mendukung proses percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan .

Untuk itu perlu disusun rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes .

BAB II

VISI DAN MISI

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pedemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya .

1. PERNYATAAN VISI

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (UU No. 25 Tahun 2004)

Pernyataan singkat berisi cita-cita organisasi dimasa yang akan datang. (ISO 9001-2000)

Salah satu aspek yang mendukung proses tercapainya kondisi yang lebih baik yaitu perekonomian yang maju dalam masyarakat yang sejahtera dan

berkeadilan, adalah meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung prasarana dan sarana yang mantap dan memadai .

Berkenaan itu Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah:

” TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA PUBLIK
BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG BERKUALITAS DAN
BERKESINAMBUNGAN “

2. PENJELASAN MAKNA

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut ;

- 1.) Tersedianya prasarana dan sarana publik Bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas dan berkesinambungan dikandung maksud ” Kualitas ” yaitu adanya prasarana dan sarana yang mempunyai kualitas baik / mantap sehingga dapat berfungsi secara optimal dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang panjang.

Mengingat Kabupaten Brebes wilayah cukup luas, maka dibutuhkan jumlah prasarana dan sarana yang memadai agar mampu mendukung dan mengakses seluruh kegiatan produksi ke daerah yang paling terpencil sekalipun .

- 2.) Guna mendukung tercapainya perekonomian yang maju dalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, adalah sejalan dan mendukung visi Kabupaten Brebes.

Dengan kondisi prasarana yang mantap dan memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan kelancaran roda perekonomian dan dengan roda perekonomian yang makin lancar diharapkan perekonomian akan maju dan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan akan terwujud.

BAB III

TUJUAN

1. TUJUAN

1.1 Tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan :

- i. Mewujudkan terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas ;
- ii. Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang mantap dan memadai ;
- iii. Terwujudnya peran serta masyarakat maupun lembaga – lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan pekerjaan umum ;
- iv. Terwujudnya normalisasi sungai – sungai rawan banjir ;
- v. Terwujudnya jaringan irigasi yang baik dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang panjang ;
- vi. Terwujudnya kawasan permukiman yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan ;
- vii. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan aktifitas masyarakat di malam hari ;
- viii. Terwujudnya terwujudnya keindahan dan kenyamanan kota hingga tingkat IKK ;
- ix. Tercapainya pengelolaan kebersihan hingga tingkat IKK ;
- x. Terwujudnya tatanan permukiman yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan ;
- xi. Terwujudnya tatanan Tata Ruang Perkotaan dan Permukiman ;

2. SASARAN

2.1 Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan :

- a. Terwujudnya peningkatan pelayanan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;

- b. Terwujudnya kelancaran arus lalu-lintas kendaraan, barang dan jasa ;
- c. Meningkatnya pengamanan kawasan permukiman, areal pertanian dan tambak dari bahaya banjir ;
- d. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi areal sawah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan ;
- e. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi areal pertanian di musim kemarau ;
- f. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan ;
- g. Menurunnya prosentase tingkat kecelakaan lalu-lintas dan kriminalitas ;
- h. Terwujudnya taman-taman kota yang sejuk dan nyaman ;
- i. Terwujudnya kondisi lingkungan dan permukiman yang bersih ;
- j. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni pada permukiman yang serasi, sehat dan nyaman serta berkelanjutan ;
- k. Terwujudnya pertumbuhan perkotaan dan permukiman yang sesuai dengan RUTRK / RT / RW .

3. STRATEGI

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah bagaimana menetapkan pencapaiannya .
Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan .

3.1.1 KEBIJAKAN

1. Mengupayakan Tersedianya Prasarana dan Sarana Kerja Yang Memadai ;
2. Meningkatkan Dan Mempertahankan Fungsi Serta Masa Pelayanan Jalan Dan Jembatan ;
3. Upaya Mendorong Swadaya Masyarakat ;
4. Upaya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Dan Pengendalian Banjir ;
5. Mengupayakan Makin Optimal dan Meningkatnya Fungsi Jarinag Irigasi ;
6. Mengupayakan Terwujudnya Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman Yang Baik dan Memadai ;
7. Mengupayakan Terpenuhinya Fasilitas Lalu – Lintas Jalan ;
8. Upaya Mewujudkan ” BREBES BERHIAS ” ;
9. Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Dari Sumber Hingga TPA ;
10. Mengupayakan Terwujudnya Perumahan dan Permukiman Yang Serasi, Sehat dan Nyaman Serta Berkelanjutan ;
11. Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Penataan Ruang Perkotaan dan Permukiman .

3.1.2 PROGRAM – KEGIATAN KUNCI

1. Peningkatan Disiplin Aparatur .
-

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman ;
 - j. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ;
 - k. Rapat – Rapat Koorinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah ;
2. Peningkatan Disiplin Aparatur .
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - b. Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor ;
 - c. Pengadaan Peralatan Kerja Aparatur ;
 - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
 - e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ;
 - g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Alat – Alat Berat ;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur .
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;

- b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran ;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;
4. Peningkatan Sistem Penawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH .
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ;
5. Pembangunan Jalan dan Jembatan .
- a. Pembangunan Jalan ;
 - b. Pembangunan Jembatan ;
 - c. Pengadaan Bantuan Aspal Untuk Desa .
6. Pembangunan Saluran Drainase / Trotoar / Gorong – gorong .
- a. Pembangunan Saluran Drainase / Trotoar / Gorong-gorong ;
 - b. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar .
7. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .
- a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan .
8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya .
- a. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai ;
 - b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
 - c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air ;
 - d. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah di Bangun ;
 - e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air ;
 - f. Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Bangunan Air .
9. Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya .

- a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya .

10. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan .

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan ;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan ;
- c. Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Pedesaan .

11. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan .

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan .

12. Pengembangan Fasilitas Lalu – Lintas Jalan .

- a. Pemeliharaan dan Pengadaan Lampu PJU .
- b. Study dan Pembuatan Database PJU se-Kab. Brebes .

13. Pembangunan Kota.

- a. Operasi dan Pemeliharaan Pertamanan .

14. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan .

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan .

15. Pengembangan Perumahan .

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat ;
- b. Penyediaan Perumahan dan Permukiman .

16. Pemberdayaan Komunitas Perumahan .

- a. Partisipasi Lomba Habitat Nasional .

17. Penataan Bangunan .

- a. Pembuatan Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) ;
- b. Inventarisasi Gedung Negara di Kab. Brebes ;
- c. Perencanaan Teknis (DE) Bidang keciptaan Karya .

C. KEGIATAN

(Vide Matriks terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah merupakan kebijakan strategis selama lima tahun ke depan dan merupakan

pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana dalam setiap tahunnya meliputi bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan serta Sarana dan Prasarana Aparatur lainnya .

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes diharapkan mampu menampung dan menyerap gagasan, pemikiran dan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkelanjutan .

Masyarakat sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan oleh karenanya keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ini disamping peran dari masyarakat juga sangat tergantung dari mental, tekad dan semangat kinerja aparatur pemerintah . Sikap mental, tekad dan semangat ini tercermin dalam kualitas dan kuantitas hasil pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian .

Hasil pembangunan yang dilaksanakan adalah milik masyarakat, karena dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat .